SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep.20-BKAD/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81 seri E);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah KabupatenBandung Barat Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam rangka penyusunan neraca daerah;
b. melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah;
c. meneliti administrasi barang dan dokumen kepemilikan;
d. meneliti kebenaran keadaan fisik Barang Milik Daerah yang dinilai;
e. melakukan survei lapangan, apabila diperlukan;
f. membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Penilaian Barang Milik Daerah; dan
g. melaporkan hasil kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengelola barang milik daerah kabupaten Bandung Barat.

KEEMPAT : Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, ketua tim sebagaimana Diktum KESATU membentuk sekretariat tim penilai yang berkedudukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 21 Januari 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 20- BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah.
Ketua	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris	:	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Anggota	:	1. Sekretaris pada Perangkat Daerah; 2. Pejabat Penatusahaan Pengguna pada Perangkat Daerah; 3. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah; 5. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat 6. Unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat; 7. Unsur Penilai dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung; 8. Unsur Kantor Jasa Penilai Publik; 9. BAMBANG PURWOYONO, ST, MT (Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah Ahli Muda Pada BPKAD Provinsi Jawa Barat); 10. DEWINA KARTIKA CANDRA A.Md, Pnl (Pengelola Barang Milik Negara pada BPKAD Provinsi Jawa Barat); 11. Pengurus Barang Pengguna pada Perangkat Daerah.

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL